



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

CATATAN BURUK PON XXI DI ACEH

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Farhan Ryandi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung dari 9 hingga 20 September 2024 merupakan ajang olahraga besar yang melibatkan 39 kontingen, 65 cabang olahraga, dan hampir 13.000 atlet. Pelaksanaan PON XXI menghabiskan anggaran sebesar 3,94 triliun rupiah, dengan 2,2 triliun rupiah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 1,7 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun acara ini berskala prestisius, persiapan pelaksanaannya belum memadai. Hingga hari pelaksanaan, banyak fasilitas dan *venue* yang belum sepenuhnya siap digunakan. Akibatnya, publik menyoroti berbagai masalah yang muncul selama penyelenggaraan, terutama di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masalah pada PON XXI dimulai dengan viralnya keluhan mengenai konsumsi atlet yang dinilai tidak memadai, baik dari segi nutrisi maupun kalori yang dibutuhkan. Keluhan ini muncul dua hari sebelum PON diselenggarakan. Anggaran yang dialokasikan untuk konsumsi setiap atlet adalah 50.900 rupiah per porsi makanan, dengan total kontrak 30,8 miliar rupiah, sementara kudapan dihargai 18.900 rupiah per porsi, dengan total kontrak 11,4 miliar rupiah. Beberapa atlet dan ofisial mengajukan protes kepada Panitia Besar (PB) PON Aceh karena kualitas makanan yang kurang layak dan keterlambatan pengiriman konsumsi. PB PON Aceh menjelaskan bahwa miskomunikasi antara *liaison officer* (LO) dan penyedia konsumsi, serta jadwal makan atlet, menjadi penyebab masalah ini.

PON XXI juga diwarnai dengan insiden kekerasan yang mencoreng semangat sportivitas. Pada 11 September 2024, Kapten Tim Sepak Bola Putra Sumatera Utara PON XXI, Alif Eka Rizky, dikeroyok oleh beberapa pemain dari kontingen Papua Barat.

Selanjutnya, pada Selasa, 17 September 2024, pukul 10.30 WIB, terjadi insiden ambruknya talang air di lapangan tembak *indoor* akibat cuaca buruk berupa hujan deras dan badai di Aceh Besar, yaitu lokasi lapangan tembak Rindam Iskandar Muda, Mata Ie. Meski tidak ada korban jiwa, pertandingan menembak terpaksa dihentikan sementara. Pemerintah merespons kejadian ini dengan mengirimkan Komite Keamanan Konstruksi (K3) melalui Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menginvestigasi penyebabnya. Setelah koordinasi antara Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Kementerian PUPR, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PB PON XXI, dan PB Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin), pertandingan dapat dilanjutkan pada Rabu, 18 September 2024, meskipun diketahui bahwa *venue* tersebut belum sepenuhnya rampung dan harus dimodifikasi.

Pada 14 September 2024, cabang sepak bola kembali mengundang perhatian, ketika wasit Eko Agus Sugiharto dipukul oleh salah satu pemain Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Rizki. Kejadian ini tertangkap kamera saat berlangsungnya laga perempat final sepak bola putra Aceh vs Sulteng.

Terakhir pada tanggal 18 September 2024, ada insiden pecahnya kaca jendela pada *venue* basket di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, yang diduga disebabkan oleh angin kencang. Peristiwa ini menyebabkan enam penonton terluka dan pertandingan dihentikan sementara.

Berbagai masalah yang muncul selama PON XXI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari segi teknis maupun substansi terkait kepemudaan dan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Pemerintah Daerah Aceh sebagai penanggung jawab penyelenggaraan harus segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan *event* ini.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PON XXI bersama Kemenpora dan Pemerintah Daerah Aceh. Evaluasi harus mencakup berbagai aspek penting, termasuk kesiapan infrastruktur yang belum optimal, logistik terkait konsumsi atlet yang dinilai tidak memadai, serta keamanan menyusul insiden kekerasan yang terjadi di beberapa cabang olahraga. Selain itu, mitigasi risiko cuaca ekstrem yang menyebabkan kerusakan pada beberapa *venue* juga harus menjadi fokus utama. Komisi X DPR RI juga perlu meminta transparansi dalam penggunaan anggaran dan mendorong Kemenpora untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, guna memastikan bahwa standar pelaksanaan *event* olahraga nasional dijalankan dengan lebih baik di masa mendatang. Evaluasi sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan penyelenggaraan PON di masa depan.

Sumber

kompas.com, 20 September 2024;
medcom.id, 19 September 2024;
Media Indonesia, 18 September 2024;
metrotvnews.com, 22 September 2024; dan
tempo.co, 21 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.